

# BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

## Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2014



**Jln. Raya Pakuwon Km. 2 Parungkuda-Sukabumi 43357**

**Jawa Barat**

**Tlp. (0266) 7070941 Fax. (0266) 6542087**

**WEBSITE : <http://balitri.litbang.deptan.go.id>.**

**Email : [balitri@gmail.com](mailto:balitri@gmail.com)**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pembinaan Akuntansi Instansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sukabumi, Januari 2015  
Kuasa Pengguna Anggaran/  
Kepala Balai,

Prof.Dr.Ir.Risfaheri,M.Si  
NIP. 19640117 198903 1 002

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	
Pernyataan Tanggung Jawab	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	2
II. Neraca	3
III. Ringkasan Laporan Keuangan	5
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Dasar Hukum	8
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	8
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	25
A.4. Kebijakan Akuntansi	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	33
B.2. Belanja Negara	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	38
C.1. Aset Lancar	38
C.2. Aset Tetap	43
C.3. Piutang Jangka Panjang	47
C.4. Aset Lainnya	48
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	50
C.6. Ekuitas Dana Lancar	52
C.7. Ekuitas Dana Investasi	54
D. Pengungkapan Penting Lainnya	54
D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	54
D.5. Pengungkapan Lain-lain	55
Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	58

	<b>Hal</b>
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember 2014 dan 2013	5
Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2014 dan 2013	6
Tabel 3 : Penggolongan Kualitas Piutang	31
Tabel 4 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	32
Tabel 5 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	33
Tabel 6 : Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2014 dan 2013	34
Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2014	34
Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2014 dan 2013	35
Tabel 9 : Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2014 dan 2013	36
Tabel 10 : Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2014 dan 2013	37
Tabel 11 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2014 dan 2013	37
Tabel 12 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013	38
Tabel 13 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	38
Tabel 14 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	39
Tabel 15 : Rincian Belanja Dibayar di Muka	40
Tabel 16 : Rincian Piutang Bukan Pajak	40
Tabel 17 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	41
Tabel 18 : Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	41
Tabel 19 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	42
Tabel 20 : Rincian Persediaan	42
Tabel 21 : Rincian Aset Tetap	43
Tabel 22 : Rincian Saldo Tanah	43
Tabel 23 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	47
Tabel 24 : Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	47
Tabel 25 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	48
Tabel 26 : Rincian Aset Lainnya	48
Tabel 27 : Rincian Aset Tak Berwujud	49
Tabel 28 : Rincian Kewajiban Jangka Pendek	50
Tabel 29 : Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	50
Tabel 30 : Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan	51
Tabel 31 : Rincian Pendapatan Diterima di Muka	51

Tabel 32	: Rincian Ekuitas Dana Lancar	52
Lampiran A1	: Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap	55
Lampiran A2	: Informasi Pendapatan dan Belanja Akrua	56

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Tahun Anggaran 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 189,737,253 atau mencapai 56.81 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 334,000,000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 13,024,785,809 atau mencapai 96.35 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 13,517,951,000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran pada 31 Desember 2014 dan pada 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

*Tabel 1*  
*Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember 2014 dan pada 31 Desember 2013*  
*(dalam Rupiah)*

Uraian	31 Desember 2014			31 Desember 2013
	Anggaran	Realisasi	% Real. Thd Anggaran	Realisasi
<b>Pendapatan Negara</b>	334,000,000	189,737,253	56.26	196,588,850
<b>Belanja Negara</b>	13,517,951,000	13,024,785,809	96.35	16,995,605,400

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 76,819,839,143. yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 9,452,520, Aset Tetap sebesar Rp. 76,681,808,623, dan Aset Lainnya sebesar Rp. 128,575,000 (neto setelah akumulasi penyusutan).

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 83,682,770. yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 76,736,153,373. yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. (74,230,250). dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 76,681,808,623.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

*Tabel 2*  
*Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013*  
*(dalam Rupiah)*

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
<b>ASET</b>				
Aset Lancar	9,452,520	11,497,820	(2,045,300)	-17.79
Aset Tetap	76,681,808,623	77,768,204,654	(1,086,396,031)	-1.40
Aset Lainnya	128,575,000	137,536,560	(8,961,560)	-6.52
<b>Jumlah Aset</b>	<b>76,819,836,143</b>	<b>77,917,239,034</b>	<b>(1,097,402,891)</b>	<b>-1.41</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
Kewajiban Jk Pendek	83,682,770	6,095,820	77,586,950	1272.79
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>83,682,770</b>	<b>6,095,820</b>	<b>77,586,950</b>	<b>1272.79</b>
<b>EKUITAS DANA</b>				
Ekuitas Dana Lancar	(74,230,250)	5,402,000	(79,632,250)	-1474.13
Ekuitas Dana Investasi	<b>76,810,383,623</b>	77,905,741,214	(1,095,357,591)	-1.41
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>76,736,153,373</b>	<b>77,911,143,214</b>	<b>(1,174,989,841)</b>	<b>-1.51</b>
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	<b>76,819,836,143</b>	<b>77,917,239,034</b>	<b>(1,097,402,891)</b>	<b>-1.41</b>

### **3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara



# **BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

*Jl. RAYA PAKUWON KM. 2 PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT*

*TELEPON (0266) 7070941 FAXIMILE. (0266) 6542087*

---

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sukabumi, Januari 2015  
Kuasa Pengguna Anggaran/  
Kepala Balai,

Prof. Dr. Ir. Risfaheri, M.Si  
NIP. 19640117 198903 1 002

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2014		% thd Anng	31 DESEMBER 2013
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	334,000,000	189,737,253	56.81	196,588,850
<b>Jum Pendpt Negara &amp; Hibah</b>	<b>334,000,000</b>	<b>189,737,253</b>	<b>56.81</b>	<b>196,588,850</b>
<b>B. Belanja Negara</b>				
1. Belanja Pegawai	6,576,841,000	6,446,373,965	98.02	6,357,462,067
2. Belanja Barang	6,244,410,000	5,901,543,894	94.51	6,233,198,018
3. Belanja Modal	696,700,000	676,867,950	97.15	4,404,945,315
<b>Jumlah Belanja Negara</b>	<b>13,517,951,000</b>	<b>13,024,785,809</b>	<b>96.35</b>	<b>16,995,605,400</b>

BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

( dalam Rp)

Uraian	Ket	31 Desember 2014	31 Desember 2013
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	(22,980)	(22,980)
Persediaan	C.1.9	9,475,500	11,520,800
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>9,452,520</b>	<b>11,520,800</b>
<b>ASET TETAP</b>	C.2		
Tanah	C.2.1	56,284,791,000	56,284,791,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	20,265,608,268	18,648,226,238
Gedung dan Bangunan	C.2.3	11,150,753,445	10,836,718,245
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	1,475,802,400	1,456,837,400
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	39,919,000	39,919,000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(12,535,065,490)	( 9,498,287,229)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>76,681,808,623</b>	<b>77,768,204,654</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	0	0
Aset Lain-lain	C.4.2	448,831,000	448,831,000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2	(320,256,000)	(311,294,440)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>128,575,000</b>	<b>137,536,560</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>76,819,836,143</b>	<b>77,917,239,034</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	83,705,750	6,118,800
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	(22,980)	(22,980)
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>(83,682,770)</b>	<b>6,118,800</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>(83,682,770)</b>	<b>6,118,800</b>
<b>EKUITAS DANA</b>			
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	C.6		
Cadangan Persediaan	C.6.1	9,475,500	11,520,800
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek	C.6.2	(83,705,750)	(6,118,800)
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>		<b>(74,230,250)</b>	<b>5,402,000</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	C.7		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.7.1	76,681,808,623	77,768,204,654
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.7.2	128,575,000	137,536,560
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>		<b>76,810,383,623</b>	<b>77,905,741,214</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>76,736,153,373</b>	<b>77,911,143,214</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>76,819,836,143</b>	<b>77,917,239,034</b>

## IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### Dasar Hukum

#### A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/ 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

### A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

#### Dasar Hukum

#### Entitas dan

#### Rencana

#### Strategis

#### 1.1. Latar Belakang

Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri) adalah Unit Pelayanan Teknis (UPT) eselon III di bawah Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan/Puslitbangbun (unit eselon II), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian/Badan Litbang Pertanian (unit eselon I), Kementerian Pertanian, yang merupakan balai penelitian komoditas yang mendapat mandat untuk melakukan penelitian tanaman karet (industri) dan tanaman kopi, kakao dan teh (penyegar) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 65/Permentan/OT.140/10/2011, tanggal 12 Oktober 2011.

Komoditas yang diamanatkan oleh Permentan nomor 65 tahun 2011 kepada Balittri tersebut merupakan komoditas strategis nasional yang mempengaruhi secara langsung perekonomian Indonesia. Di samping itu

keempat komoditas tersebut telah menjadi sumber penghidupan jutaan rakyat Indonesia, terutama karet dan kakao yang masing-masing dikelola oleh rakyat 85% dan 87,4%. Oleh karena peranan Balitri yang menangani penelitian dan pengembangan dari komoditas-komoditas tersebut sangat penting dan memiliki peran yang sangat strategis.

Dalam rangka menjalankan peran Balitri ke depan, permasalahan-permasalahan umum sektor pertanian, khususnya di bidang tanaman industri dan penyegar, yang dihadapi semakin kompleks, diantaranya: (1) makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi; (2) perubahan iklim global; (3) perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat; (4) status dan luas kepemilikan lahan; (5) rendahnya diseminasi inovasi teknologi; (6) kelembagaan serta terbatasnya akses permodalan; (7) tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar; (8) pesatnya perubahan kemajuan teknologi dan informasi pertanian global; dan (9) dinamika politik dalam dan luar negeri. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Balitri akan terus berinisiatif melakukan langkah-langkah visioner melalui reorganisasi dan restrukturisasi program, serta optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan sumberdaya penelitian yang dimiliki.

Paradigma Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian adalah penciptaan teknologi pertanian yang memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi untuk mewujudkan peran litbang dalam pembangunan pertanian (*impact recognition*) dan nilai ilmiah tinggi (*scientific recognition*) untuk pencapaian status sebagai lembaga penelitian berkelas dunia (*a world class research institution*), akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balitri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Renstra**

Rencana Strategi (Renstra) merupakan bagian pertama dari Manajemen Strategi (Manstra) yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi lembaga. Sedangkan strategi lembaga itu sendiri berisikan kebijakan, program dan kegiatan lembaga. Renstra Balitri ini disusun untuk dijadikan pedoman dan arah bagi pelaksanaan tugas Balitri sesuai dengan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 3 tahun (2012 -2014). Renstra ini tidak berdiri sendiri melainkan sebagai turunan yang mempunyai hubungan dan koherensi yang kuat dengan Renstra unit eselon II, eselon I, dan Kementerian Pertanian. Pada Renstra ini lebih menitikberatkan kepada rencana

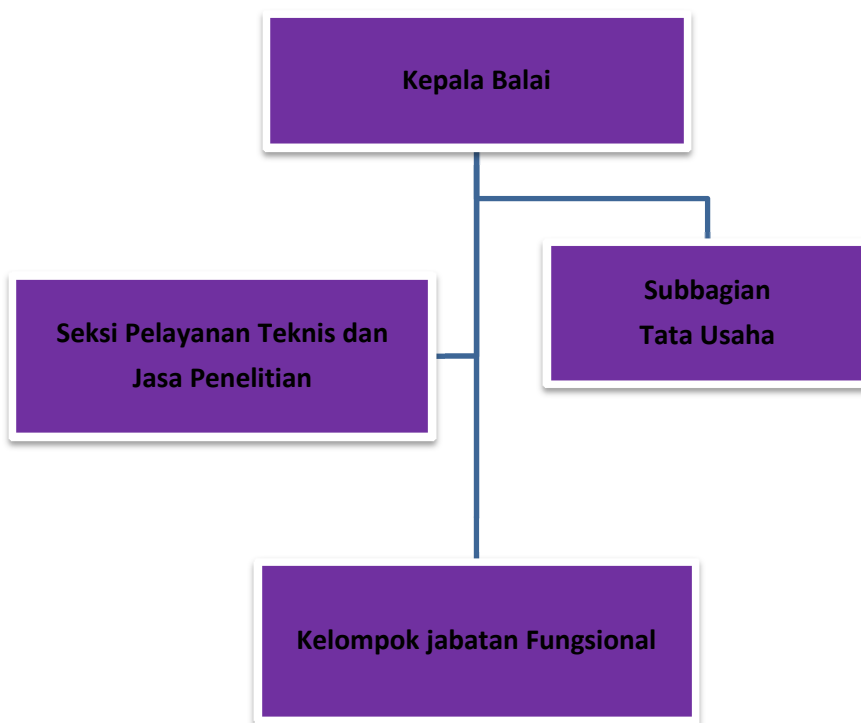
implementasi program-program dan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang komoditas tanaman karet, kopi, kakao dan teh untuk mewujudkan visi Balittri serta mendukung visi Puslitbangbun, Badan Litbang Pertanian, dan Kementerian Pertanian.

## BAB II KONDISI UMUM

### 2.1. Struktur Organisasi

Struktur Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar terdiri dari:

- a. Kepala Balai
- b. Subbag Tata Usaha
- c. Seksi Pelayanan Teknis dan Jasa Penelitian
- d. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1. Struktur organisasi Balittri

## **2.2. Tugas dan Kewenangan**

### **2.2.1. Subbagian Tata Usaha**

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, dan kearsipan serta rumah tangga.

### **2.2.2. Seksi Pelayanan Teknis dan Jasa Penelitian**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan evaluasi dan laporan serta pelayanan sarana penelitian, penyiapan bahan kerjasama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian

### **2.2.3. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional peneliti dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi berdasarkan bidang kepakaran masing-masing.

Tugas jabatan fungsional peneliti:

1. Melaksanakan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman industri dan penyegar
2. Melaksanakan penelitian morfologi, ekologi, entomologi, dan fitopatologi tanaman industri dan penyegar
3. Melaksanakan penelitian komponen teknologi system dan usaha agribisnis tanaman industri dan penyegar
4. Melaksanakan penelitian penanganan hasil tanaman industri dan penyegar.

Sedangkan tugas jabatan fungsional lainnya adalah melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.

## **2.3. Sumberdaya (Manusia, Sarana Prasarana, dan Anggaran)**

Sumberdaya manusia (SDM) peneliti yang ada di Balitri dari data tahun 2012 sebanyak 39 orang dengan berbagai tingkat jabatan fungsional. Jabatan fungsional Peneliti Madya menempati urutan terbanyak (38,9%) dan Peneliti Utama menempati urutan terakhir (0,0%). Jumlah peneliti yang dikategorikan Non-Klasifikasi juga cukup besar yaitu 10 orang (25,7%), dan hal ini disebabkan karena tenaga tersebut merupakan hasil rekrutmen tenaga

yang baru dilakukan (Tabel 1). Jumlah keseluruhan SDM di Balitri sebanyak 101 orang dengan beragam jenjang pendidikan dan golongan. Dari delapan jenjang pendidikan yang ada, pendidikan SLTA menempati urutan terbanyak (35,6%) diikuti jenjang pendidikan S1 (31,7%) dan S2 (10,9%). Sisanya tersebar dari jenjang pendidikan SD, SLTP, D1, dan D3 (Tabel 2).

Tabel 1. SDM peneliti berdasarkan jabatan fungsional

No	Tingkat Jabatan Fungsional	Jumlah	Persentase
1.	PenelitiUtama	0	0,0
2.	PenelitiMadya	15	38,5
3.	PenelitiMuda	7	17,9
4.	PenelitiPertama	7	17,9
5.	Peneliti Non-Klasifikasi	10	25,7
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	<b>100,0</b>

Tabel 2. SDM berdasarkan jenjang pendidikan dan golongan

Golongan	Jenjang Pendidikan								Jumlah
	S3	S2	S1	D3	D1	SLT A	SLT P	SD	
I	-	-	-	-	-	-	-	7	7
II	-	-	-	2	-	21	4	3	30
III	4	7	21	-	1	15	-	-	48
IV	1	4	11	-	-	-	-	-	16
Jumlah	5	11	32	2	1	36	4	10	101
Persentase	4,9	10,9	31,7	1,9	0,9	35,6	3,9	10,2	100,0

Sarana prasarana laboratorium yang ada di Balitri saat ini masih belum memadai untuk melakukan penelitian keempat komoditas mandat. Mulai tahun 2012 sudah dimulai pengadaan peralatan laboratorium dari berbagai sumber dana, baik APBN, APBD, maupun SMARTD. Gedung



laboratorium yang ada di Balittri terdiri dari laboratorium Pemuliaan/Bioteknologi, Ekofisiologi, dan Proteksi

(Tabel 3).

Tabel 3. Saranaprasarana Laboratorium

No	Nama Laboratorium	Status
1.	Pemuliaan dan Bioteknologi	Belum terakreditasi
2.	Ekofisiologi	Belum terakreditasi
3.	Proteksi	Belum terakreditasi

Sarana prasarana penelitian lainnya, seperti Kebun Percobaan (KP), di Balittri terdiri dari tiga KP, yaitu : KP. Pakuwon (Jawa Barat) seluas 159,6 ha, KP. Gunung Puteri (Jawa Barat) seluas 6,7 ha, dan KP. Cahaya Negeri (Lampung Utara) seluas 30,0 ha. Masing-masing KP yang ada mempunyai peruntukkan yang berbeda-beda (Tabel 4).

Di bidang sumberdaya anggaran, secara umum menunjukkan kenaikan mulai dari tahun 2008 sampai 2011. Sedangkan anggaran terbesar yaitu pada tahun 2007 karena saat itu baru dimulainya pembangunan gedung utama Balittri beserta beberapa fasilitas lainnya (Tabel 5). Secara umum anggaran yang dialokasikan di Balittri belum memadai untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi keempat komoditas strategis yang menjadi mandat Balittri.

Tabel 4. Sarana prasarana Kebun Percobaan

No	Nama Kebun Percobaan	Luas (Ha)	Lokasi	Peruntukkan
1.	Pakuwon	159,6	Sukabumi, Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Koleksi PN (kopi, kakao, karet)</li> <li>❖ Penelitian (kopi, kakao, karet)</li> <li>❖ Diseminasi teknologi (pelatihan, magang)</li> <li>❖ <i>Show window</i> teknologi (kopi, kakao, karet)</li> <li>❖ UPBS (kopi, kakao, karet)</li> </ul>
				➤ Koleksi PN (kopi,

2.	Cahaya Negeri	30,0	Kotabumi, Lampung Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kakao, karet)</li> <li>➤ Penelitian (kopi, kakao, karet)</li> <li>➤ Diseminasi Teknologi (pelatihan, magang)</li> <li>UPBS (kopi, kakao, karet)</li> </ul>
3.	Gunung Puteri	6,7	Cianjur, Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Koleksi PN teh dan kopi Arabika</li> <li>❖ Penelitian (teh, kopi)</li> <li>❖ Diseminasi (pelatihan, magang)</li> <li>❖ UPBS (teh)</li> </ul>

Tabel 5. Perkembangan anggaran tahun 2007-2011 (dalam ribuan)

No	Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Modal	Belanja Barang	Total Anggaran
1.	2007	4.404.089	5.376.500	3.417.390	13.197.979
2.	2008	5.603.653	805.500	2.053.200	8.444.353
3.	2009	5.198.000	279.500	3.549.984	9.027.484
4.	2010	5.156.742	310.000	4.059.466	9.526.208
5.	2011	5.624.175	673.320	3.747.225	10.044.720
<b>Jumlah</b>		25.986.659	7.444.820	16.809.265	50.240.744

#### 2.4. Kinerja Utama Balitri 2007– 2014

Selama kurun waktu 2007-2014, Balitri mempunyai mandat komoditas Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri. Selama kurun waktu tersebut telah dilepas sebanyak 19 varietas unggul (jambu mete, gambir, pala, cengkeh, dan kemiri) dan 2 klon unggul (vanili), 33 komponen teknologi produksi (teknologi budidaya, pengendalian OPT, dan bahan dasar untuk rekomendasi kebijakan), empat jenis publikasi (newsletter, sirkuler teknologi, buletin, dan bunga rampai/prosiding), dan tiga bahan HAKI (Tabel6).

Tabel 6. Kinerja utama Balittri 2007-2011

Kinerja Utama	Jumlah per tahun					Total
	2007	2008	2009	2010	2011	
▪ Varietas	5	5	4	3	3	20
▪ Klon	-	2	-	-	-	2
▪ Teknologi/ Komponen Teknologi Produksi	7	5	7	8	6	33
▪ Formula	-	-	-	-	-	-
▪ Publikasi (jenis)	-	2	4	3	4	-
▪ HAKI	-	-	-	-	1	3

### BAB III. POTENSI, PERMASALAHAN, DAN IMPLIKASI

Pasar hasil perkebunan, ke depan akan mengalami perubahan fundamental di sisi permintaan karena adanya perubahan lingkungan strategis domestik maupun internasional. Hal ini disebabkan kondisi permintaan melebihi sisi penawaran karena semakin intensifnya proses industrialisasi di berbagai negara dan peningkatan jumlah penduduk. Beberapa tahun ke depan harga produk perkebunan diperkirakan akan semakin mahal. Terkait dengan dinamika perubahan lingkungan strategis domestik maupun internasional tersebut. Hal perlu dicermati berbagai aspek terkait dengan potensi (kekuatan dan peluang) maupun permasalahan/kelemahan. Implikasi yang dihadapi sektor perkebunan khususnya yang terkait dengan penelitian dan pengembangan perkebunan agar mampu merumuskan perencanaan strategis lima tahun ke depan secara lebih kontekstual.

#### 3.1. Potensi

##### 3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi, Penduduk, Permintaan Pangan

Beberapa negara Asia seperti Cina, India dan Indonesia, akhir akhir ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat melebihi rata-rata

pertumbuhan ekonomi negara-negara maju. Pertumbuhan sektor perkebunan berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia sebesar 3,57% per tahun selama periode 2005 - 2009. Pertumbuhan ekonomi tersebut berkontribusi pada keberhasilan mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Penduduk miskin di Indonesia pada tahun 1999 mencapai 48 juta jiwa (23,43%), menurun menjadi 37,3 juta jiwa (17,42%) pada tahun 2003, 36,1 juta jiwa (16,66%) pada tahun 2004 dan terus berkurang menjadi 32,5 juta jiwa (14,15%) pada tahun 2009.

Pertumbuhan penduduk Indonesia lima tahun terakhir rata-rata 1,27%/tahun dengan jumlah penduduk saat ini 237 juta jiwa. Dinamika pertumbuhan penduduk Indonesia tersebut ditinjau dari kualitas, pasar tenaga kerja, tingkat pendidikan, mobilitas, dan aspek jender tentu akan sangat berpengaruh terhadap keragaan pembangunan pertanian di masa mendatang. Peningkatan jumlah penduduk berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja disatu sisi tetapi disisi lain meningkatnya tekanan permintaan terhadap lahan untuk penggunaan non-pertanian.

Dinamika pertumbuhan penduduk dan pendapatan masyarakat Indonesia yang diperkirakan terjadi dalam lima tahun ke depan, berpotensi menciptakan peluang pasar yang besar bagi produk perkebunan tertentu seperti minyak goreng, gula dan kakao.

### **3.1.2. Keanekaragaman Hayati dan Agroekosistem**

Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah (*mega biodiversity*), termasuk plasma nutfah. *Biodiversity* darat Indonesia terbesar nomor dua di dunia setelah Brasil, sedangkan bila termasuk kelautan maka Indonesia nomor satu dunia. Keanekaragaman hayati yang didukung dengan sebaran kondisi geografis, berupa dataran rendah dan tinggi serta iklim yang sesuai berupa limpahan sinar matahari, intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, serta keanekaragaman jenis tanah memungkinkan dibudidayakannya aneka jenis tanaman daerah tropis maupun komoditas introduksi dari daerah sub tropis secara merata sepanjang tahun di Indonesia.

Aneka ragam dan besarnya jumlah plasma nutfah tanaman yang sudah beradaptasi dengan iklim tropis merupakan sumber materi genetik yang dapat direkayasa untuk menghasilkan varietas dan klon tanaman unggul. Hal ini dapat dilihat dengan beragamnya jenis komoditas perkebunan seperti tanaman obat, tanaman atsiri, tanaman industri, tanaman serat,

tanaman palma dan tanaman penghasil BBN yang sudah sejak lama diusahakan sebagai sumber pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembangunan perkebunan perlu kebijakan untuk perlindungan dan tata aturan pemanfaatan keanekaragaman hayati tersebut.

### **3.1.3. AFTA dan ACFTA**

Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas ASEAN (AFTA) dan ASEAN-China (ACFTA), produk pertanian Indonesia, baik mentah maupun olahan, seperti minyak sawit dan turunannya, karet olahan, biji kakao, tanaman rempah, tanaman atsiri, tanaman obat, tanaman kelapa dan lainnya berpeluang untuk dipasarkan ke pasar ASEAN dan China. Apabila peluang pasar dalam dan luar negeri dapat dimanfaatkan dengan meningkatkan daya saing berbasis pada keunggulan komparatif dan kompetitif, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat potensial bagi hasil perkebunan Indonesia. China, Malaysia dan Singapura merupakan pasar utama Indonesia dalam ekspor hasil perkebunan di atas.

Indonesia perlu mengantisipasi kemungkinan penurunan harga di pasar global dengan diliberalisasikannya perdagangan bilateral, hal ini akan memberikan peluang untuk merebut pasar sekaligus bisa menjadi ancaman tersendiri. Implikasinya, dibutuhkan kebijakan yang komprehensif dan konsisten dalam sistem pengembangan komoditas ekspor.

### **3.1.4. Kebijakan Otonomi Daerah**

Seiring dengan pelaksanaan era otonomi daerah melalui diterapkannya UU No.32 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 tahun 2000 tentang Otonomi Daerah, telah terjadi beberapa perubahan penting yang berkaitan dengan peran pemerintah pusat dan daerah. Pada sektor pertanian, peran pemerintah yang sebelumnya sangat dominan, saat ini berubah menjadi fasilitator, stimulator atau promotor pembangunan perkebunan. Pembangunan perkebunan pada era otonomi daerah akan lebih mengandalkan kreativitas masyarakat di setiap daerah. Selain itu, proses perumusan kebijakan juga akan berubah dari pola *top-down* dan sentralistik menjadi pola *bottom-up* dan desentralistik. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan akan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya akan menangani aspek-aspek pembangunan pertanian yang bernilai strategis.

### **3.1.5. Posisi dan Jejaring**

Saat ini sudah banyak tersedia paket teknologi tepat guna hasil litbang tanaman industri dan penyegar yang dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan produktifitas, kualitas dan kapasitas produksi. Berbagai varietas dan klon berdaya produksi tinggi; berbagai teknologi produksi, aneka teknologi budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil sudah cukup banyak dihasilkan para peneliti di lembaga penelitian maupun yang dihasilkan oleh masyarakat petani.

Jejaring kerja ini bermanfaat untuk optimalisasi penggunaan sumberdaya, menghindari tumpang-tindih penelitian, meningkatkan kualitas penelitian dan mengefektifkan diseminasi hasil penelitian. Saat ini Puslitbang Perkebunan memiliki jejaring kerja yang cukup luas baik nasional maupun internasional. Secara nasional telah terbentuk konsorsium penelitian untuk beberapa komoditas dan bidang masalah yang melibatkan beberapa lembaga penelitian di bawah koordinasi Kementerian Ristek (LIPI, BATAN, BPPT) dan beberapa perguruan tinggi. Untuk mengefektifkan diseminasi telah terbentuk pula jejaring kerja dengan pemerintah daerah, pihak swasta dan instansi pengambil kebijakan baik dalam lingkup kementerian maupun di luar Kementerian Pertanian.

### **3.1.6. DukunganPendanaan**

Sebagai lembaga negara di bawah naungan Badan Litbang Pertanian, Pusat penelitian dan pengembangan Puslitbang Perkebunan, anggaran Balittri bersumber dari APBN yang dituangkan dalam DIPA. Kepastian adanya pembiayaan ini merupakan landasan yang kuat bagi Balittri untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Walaupun masih relatif kecil, jumlah dana yang dialokasikan ke Balittri secara nominal cenderung naik dari tahun ke tahun. Selama tahun anggaran 2007-2011, dana paling tinggi terjadi pada tahun 2007 dikarenakan pada tahun tersebut saatnya dilakukan pembangunan gedung baru serta beberapa sarana lainnya (Tabel 5).

Dalam hal penggalan sumber dana lain di luar APBN, paradigma baru yang timbul akibat penerapan UU No. 18/2002, adalah: (a) kerjasama

penelitian dan pengembangan antara lembaga tingkat pusat dan lembaga tingkat daerah digalakkan; (b) kerjasama penelitian dan pengembangan antara lembaga publik dan lembaga swasta dirangsang; (c) kerjasama penelitian dan pengembangan antara lembaga nasional dan internasional diberi peluang lebih besar. Dampak positif dari kerjasama tersebut antara lain adalah adanya sumber pendanaan di luar APBN yang apabila dapat dikelola dengan baik secara mandiri dapat memberikan dorongan bagi perkembangan litbang perkebunan. Namun demikian, penerapan UU No. 18/2002 khususnya dalam hal pemanfaatan secara langsung pendapatan dari hasil komersialisasi teknologi masih perlu diperjuangkan.

### **3.2. Permasalahan (Tantangan)**

#### **3.2.1. Sumberdaya dan Pemanfaatan Hasil Penelitian**

Pada tahun 2012 jumlah SDM di Balittri mencapai 101 orang dengan perinciannya : tenaga peneliti 39 orang (38,6%), tenaga teknisi litkayasa 16 orang (15,8%), dan tenaga penunjang lainnya 46 orang (45,6%). Komposisi tersebut untuk institusi penelitian dan pengembangan berdasarkan tupoksinya dirasa belum memadai. Sebagai contoh, dengan angka perbandingan di atas maka satu orang tenaga litkayasa mempunyai beban tugas membantu kegiatan penelitian bagi dua orang peneliti.

Sarana laboratorium penelitian yang ada di Balittri berjumlah tiga buah pada umumnya telah digunakan secara optimal untuk penelitian. Dari ke-3 laboratorium tersebut, belum ada laboratorium yang telah terakreditasi berdasarkan ISO 17025: 2005. Tantangan ke depan adalah peningkatan kompetensi laboratorium yang belum terakreditasi hingga diperoleh pengakuan internasional melalui akreditasi. Daya saing ilmiah dan komersial selanjutnya harus dijadikan sasaran dalam pengembangan laboratorium.

Sarana penelitian lainnya seperti tiga buah kebun percobaan dengan luas 196,3ha yang dikelola oleh Balittri sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang tanaman karet, kopi, kakao, dan teh. Hal ini disebabkan karena keempat komoditas yang dimaksud merupakan komoditas yang benar-benar baru bagi Balittri sehingga keberadaan plasma nutfah, kebun penelitian maupun kebun produksi untuk keempat komoditas tersebut belum tersedia dengan memadai. Namun demikian, diawali tahun anggaran 2011 Balittri sudah memulai kegiatan-kegiatan yang menuju ke arah sana sehingga kondisi saat ini sudah

mulai kelihatan di tiga kebun percobaan kehadiran keempat komoditas baru yang diimban, walaupun sebagian besar masih status tanaman belum menghasilkan (umur 1 -2 tahun).

Hasil penelitian yang berupa paten, lisensi dan lainnya serta penyaluran hasil penelitian masih berskala nasional dan tingkat komersialisasinya rendah. Indonesia bahkan menjadi pengguna paten atau lisensi hasil penelitian dari negara lain. Permasalahan ini terkait dengan belum kondusifnya sistem hukum yang mengatur komersialisasi hasil penelitian. Potensi kerugian yang timbul tentunya sulit diprediksi secara kuantitatif mengingat berbagai faktor yang mempengaruhi perolehan royalti, antara lain :

1. Kesepakatan besarnya persentase royalti antara Unit Kerja pemilik HKI dengan industri sebagai penerima lisensi;
2. Nilai ekonomis dari teknologi hasil litbang yang dilisensikan;
3. Kondisi lingkungan strategis seperti : potensi pasar (kebutuhan dan daya beli), iklim/cuaca, geografis untuk distribusi, dukungan kelembagaan dan lembaga keuangan dan persaingan industri baik domestik maupun internasional (teknologi luar).

### **3.2.2. Sarana dan Kelembagaan Sarana Produksi**

Hingga saat ini masih dijumpai adanya senjang (*gap*) antara produktivitas dan mutu hasil penelitian dengan produktivitas di tingkat petani. Akar masalah yang utama adalah (a) perbedaan ketersediaan sarana produksi, seperti benih unggul bermutu; (b) Perbedaan dalam penguasaan dan penerapan inovasi teknologi; dan (c) belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Keterbatasan sarana seperti misalnya jalan usaha tani akan berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran arus *input* dan *output* produksi perkebunan yang tentunya akan berpengaruh terhadap produktivitas perkebunan secara keseluruhan. Keterbatasan penguasaan inovasi teknologi akan berpengaruh terhadap produktivitas dan pendapatan petani. Keterbatasan kelembagaan sistem usaha tani juga akan berpengaruh terhadap kemudahan dalam mengakses sumber pembiayaan dan penyaluran/pemasaran hasil perkebunan.

Dalam pembangunan perkebunan ke depan, senjang tersebut harus dipersempit melalui pengembangan sarana dan kelembagaan dan percepatan



diseminasi penerapan inovasi teknologi yang memadai di tingkat usaha tani. Upaya pengembangan harus dilakukan secara bertahap hingga mencapai kondisi yang optimal.

### **3.2.3. Perubahan Iklim Global**

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim (*climate change*) akibat pemanasan global (*global warming*) dan pergeseran musim. Perubahan iklim diyakini akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan dan sektor pembangunan perkebunan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di daerah khatulistiwa termasuk wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan, kenaikan muka air laut, kenaikan suhu udara dan peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrim adalah dampak serius perubahan iklim yang dihadapi Indonesia. Perkebunan merupakan sektor yang mengalami dampak yang serius dan kompleks akibat perubahan iklim tersebut, yaitu terkait dengan aspek biofisik dan fisik, serta aspek sosial dan ekonomi.

Dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah terjadinya penurunan produksi pertanian serta ancaman perubahan keanekaragaman hayati yang pada akhirnya dapat menjadi penyebab meningkatnya eksplosi hama dan penyakit tanaman. Kondisi tersebut dapat berakibat pula pada bergesernya pola dan kalender tanam serta diperlukannya upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Di pihak lain, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu menentukan awal musim tanam serta melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi dan adaptasi yang diperlukan. Disamping itu, perlu diciptakan teknologi tepat guna dan berbagai varietas yang memiliki potensi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) rendah, toleran terhadap cekaman lingkungan seperti kenaikan suhu, kekeringan, genangan, hujan berkepanjangan, salinitas dan erupsi gunung berapi.

## **3.3. Implikasi bagi Balittri**

### **3.3.1. Kebijakan Litbang Tanaman Industri dan Penyegar**

Implikasi penting bagi Balittri adalah perlunya: (1) meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas lembaga dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi program, *output* serta peningkatan kualitas SDM; (2) meningkatkan penguasaan iptek mutakhir dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan perkebunan serta kemutakhiran teknologi yang dihasilkan, (3) memperluas jaringan kerjasama penelitian antar lembaga penelitian nasional secara sinergis dalam rangka pemanfaatan/diseminasi hasil penelitian. Litbang tanaman industri dan penyegar harus fokus pada penciptaan teknologi benih, teknologi budidaya, teknologi diversifikasi dan pengolahan untuk peningkatan nilai tambah yang berdaya saing. Penelitian ditujukan untuk meningkatkan daya saing komoditas dengan karakteristik yang sesuai keinginan konsumen, baik pasar domestik, maupun pasar ekspor.

### **3.3.2. Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar**

Secara umum orientasi Litbang tanaman industri dan penyegar adalah mendukung pencapaian produktivitas dan produksi Perkebunan. Berdasarkan tupoksoinya Balittri melaksanakan penelitian pada komoditas tanaman industri (karet) dan tanaman penyegar (kopi, kakao, dan teh). Keempat komoditas tersebut merupakan komoditas ekspor sehingga memegang peranan yang strategis bagi perekonomian Indonesia. Pengelolaan perkebunan keempat komoditas tersebut sebagian besar dilakukan dalam bentuk perkebunan rakyat sehingga akan mempunyai dampak langsung yang signifikan bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Penelitian-penelitian yang dilakukan di Balittri cukup luas dan beragam mulai dari tingkat hulu sampai pada tahapan panen dan penanganan hasil panen. Penelitian dilakukan secara terintegrasi dari berbagai bidang, mulai dari bidang bioteknologi, pemuliaan, budidaya tanaman, proteksi, pengolahan, sampai pada bidang sosial ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, Balittri semaksimal mungkin akan mendorong pelaksanaan penelitiannya bekerjasama dengan mitra, dan/atau untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perkebunan atas dasar permintaan termasuk penelitian strategis.

### **3.3.3. Pemanfaatan Hasil dan Jejaring Kerja**

Penerapan invensi hasil litbang perkebunan dalam rangka percepatan

diseminasi inovasi teknologi, merupakan faktor penentu bagi upaya percepatan pelaksanaan program pembangunan perkebunan dalam arti umum. Puslitbang Perkebunan sebagai sumber utama inovasi teknologi perkebunan harus menghasilkan invensi yang terencana, terfokus dengan sasaran yang jelas dan dapat diterapkan pada skala industri untuk memecahkan masalah aktual yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara umum kegiatan kerjasama dan peningkatan jejaring kerja dapat dikategorikan menjadi: (1) memperkuat dan memperluas jejaring kerja dengan lembaga-lembaga penelitian pemerintah dan perguruan tinggi untuk mengoptimalkan penggunaan sumberdaya, menghilangkan tumpang-tindih penelitian, konvergensi program litbang dan meningkatkan kualitas penelitian, (2) memperkuat keterkaitan dengan swasta, lembaga penyuluhan dan pengambil kebijakan dengan melibatkan mereka pada tahap penyuminyak program dan perancangan penelitian untuk mengefektifkan diseminasi hasil penelitian.

#### **3.3.4. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Peneliti Puslitbang Perkebunan harus merupakan peneliti yang profesional, yaitu seseorang yang menghasilkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya. Peneliti yang telah ahli dalam suatu bidang disebut "profesional" dalam bidangnya. Selain profesional, peneliti juga harus memiliki karakter yang kuat dalam hal tanggung jawab, jujur, respek, integritas, bermartabat dan patriotik dalam arti mempunyai kebanggaan sebagai bangsa.

Laboratorium dan kebun percobaan sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber PNBP. Masalah SDM yang lemah, dana pengelolaan kebun yang kurang memadai, peneliti yang kurang berminat melakukan penelitian di kebun berimplikasi pada perlunya dilakukan revitalisasi SDM dan pendanaan. Pelatihan dan magang di laboratorium atau kebun percobaan yang telah berkembang perlu dilakukan, disamping mencoba melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (*outsourcing*) jika dana APBN terbatas.

#### **3.3.5. Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Balittri**

Utama menjawab tantangan globalisasi, standarisasi lembaga penelitian dalam kaitannya dengan kebijakan komersialisasi hasil dan jasa penelitian, Puslitbang perkebunan harus mampu memberikan jaminan mutu terhadap hasil-hasil penelitian/ dan mendapatkan pengakuan secara nasional dan internasional melalui proses akreditasi/sertifikasi. Jaminan mutu dan pengakuan akreditasi/sertifikasi tersebut hanya dapat dicapai bila laboratorium dan unit kerja lingkup Puslitbang perkebunan dapat menerapkan Good Laboratory (GLP) dan Quality Management System(QMS) dalam melaksanakan kegiatannya. GLP dan QMS tersebut dapat dilaksanakan melalui implementasi system akreditasi/sertifikasi dengan dasar acuan standar yang ada. Acuan standar GLP adalah ISO/IEC 17025:2005, sedangkan acuan standar QMS adalah ISO 9001:2008. Saat ini, dari 26 laboratorium yang dimiliki Puslitbang perkebunan, 2 laboratorium sudah mendapat akreditasi ISO/IEC 17025:2005, dua laboratorium sedang dalam proses akreditasi. Sedangkan untuk penerapan QMS, seluruh UK/UPT Puslitbang Perkebunan saat ini sudah mendapat sertifikat ISO 9001:2008.

Selain laboratorium, Balitri memiliki tiga Kebun Percobaan (KP) seluas 194,6 ha yang digunakan untuk penelitian, pengembangan dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan PNBPN, koleksi dan konservasi plasma nutfah.

## **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

### **4.1. Visi**

Berdasarkan pada visi Badan Litbang Pertanian dan Puslitbang Perkebunan 2010-2014, maka visi Balitri sesuai dengan tupoksinya adalah : **“Menjadi balai penelitian berkelas dunia yang menghasilkan inovasi teknologitanaman industri dan penyegar untuk mewujudkan perkebunan modern berbasis sumber daya lokal”**.

### **4.2. Misi :**

1. Menghasilkan, mengembangkan, dan mendiseminasikan inovasi teknologi tanaman industri dan penyegar yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber daya lokal guna mendukung terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan;

2. Meningkatkan kualitas dan optimalisasi sumberdaya penelitian tanaman industri dan penyegar;
3. Mengembangkan jaringan dan meningkatkan kerjasama iptek ditingkat nasional dan internasional.

#### 4.3. Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Balittri adalah sebagai berikut:

1. Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Benih Unggul, Teknologi Budidaya dan Peningkatan Nilai Tambah Tanaman Industri dan Penyegar, yang sasarannya adalah tersedianya:
    - a. Varietas unggul tanaman industri dan penyegar;
    - b. Teknologi Produksi (budidaya, proteksi, pengolahan hasil, sosial ekonomi) tanaman industri dan penyegar;
    - c. Produk Olahan dan Teknologi Peningkatan Nilai Tambah tanaman industri dan penyegar;
    - d. Benih unggul tanaman industri dan penyegar;
    - e. Plasma Nutfah tanaman industri dan penyegar.
  2. Meningkatkan Diseminasi hasil penelitian tanaman industri dan penyegar kepada pengguna yang sasarannya adalah :
    - a. Meningkatnya hasil publikasi hasil penelitian;
    - b. Meningkatnya penyebaran hasil penelitian perkebunan kepada pengguna;
- Terjalannya kerjasama dengan pihak lain.

#### A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.4 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta I adalah sebagai berikut

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Pendapatan*

##### (1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Belanja*

##### (2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Kebijakan  
Akuntansi atas  
Aset

### (3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

#### a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

#### **Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

#### *Piutang Jangka Panjang*

#### **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan



Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### Aset Lainnya

#### Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

#### Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

#### (4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Ekuitas Dana*

#### **(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana**

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan *kewajiban* jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih*

#### **(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian

Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 3  
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Kebijakan  
Akuntansi atas  
Penyusutan  
Aset Tetap

#### (7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat

dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

*Tabel 4*  
*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan Negara  
dan Hibah

Rp. 189,737,253

### B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 189,737,253 atau mencapai 56,81 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 334,000,000. Pendapatan Negara dan Hibah Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar terdiri dari Pendapatan dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Pengelolaan BMN, dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5  
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

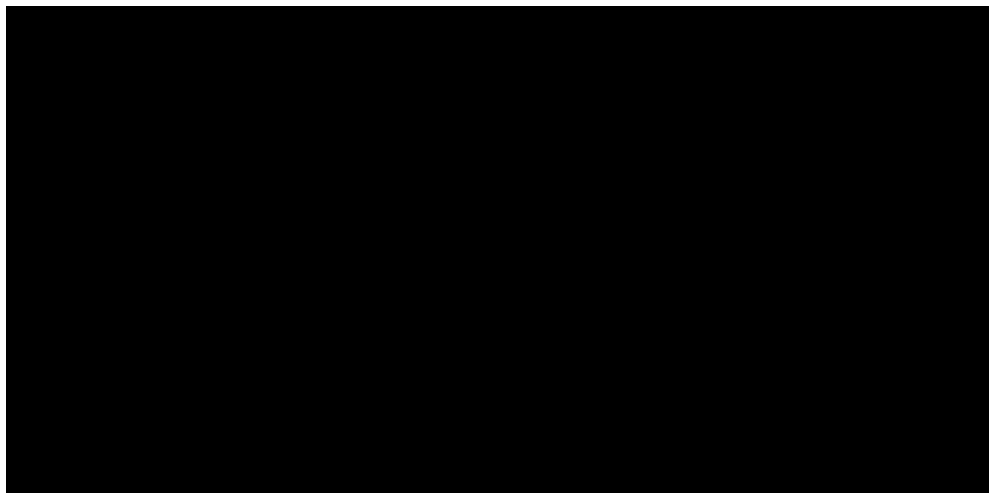
Uraian	Semester Tahun Anggaran 2014		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	331,000,000	168,142,500	32.57
2. Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan	3,000,000	662,172	11.03
3. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	5,757,030	100
4. Pendapatan Jasa Lainnya	-	2,550,000	100
5. Pendapatan Denda Keterlambatan	-	3,665,115	100
6. Pendapatan Lain-Lain	-	8,404,983	100
7. Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	555,453	100
<b>Jumlah</b>	<b>334,000,000</b>	<b>189,737,253</b>	<b>56,80</b>

Berdasarkan Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2014 dan 2013 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBPN per 31 Desember 2014 mengalami penurunan sebesar 3 persen dari realisasi pendapatan dari PNBPN 31 Desember 2014.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penurunan Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan ;
2. Penurunan Pendapatan Peralatan dan Mesin ;
3. Penurunan Pendapatan Denda Keterlambatan ;

Tabel 6  
Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2014 dan 2013



Realisasi Belanja  
Negara  
Rp. 13,055,265,209

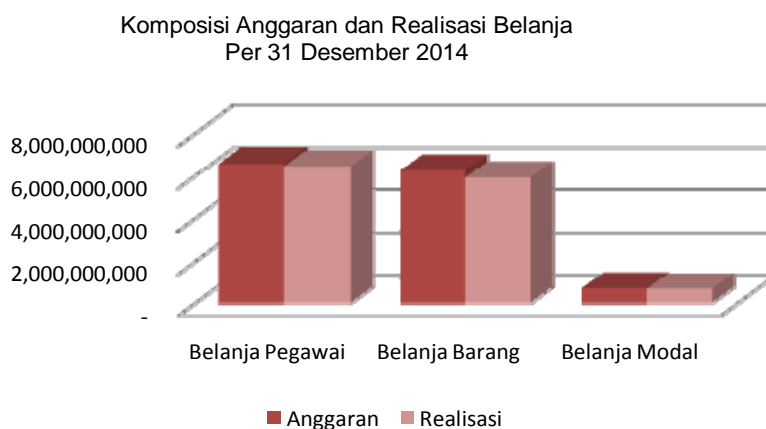
## B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 13,055,265,209. atau 96,58 persen dari anggaran senilai Rp. 13,517,951,000. Rincian Anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2014

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	6,576,841,000	6,464,851,135	98.3
Belanja Barang	6,244,410,000	5,917,973,894	94.77
Belanja Modal	696,700,000	693,502,950	99.54
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>13,517,951,000</b>	<b>13,076,327,979</b>	<b>96.73</b>
Pengembalian Belanja		(51,542,170)	0
<b>Belanja Netto</b>	<b>13,517,951,000</b>	<b>13,024,785,809</b>	<b>96.35</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) per 31 Desember 2014 dan 2013 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada 31 Desember 2014 mengalami penurunan sebesar 23,36 persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2013.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pengadaan belanja modal menurun dalam rangka mendukung rencana kerja strategis ;
2. Penurunan belanja barang dikarenakan penghematan anggaran.

*Tabel 8*  
*Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2014 da 2013*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA.2014	REALISASI TA.2013	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6,446,373,965	6,357,462,067	1.40
Belanja Barang	5,901,543,894	6,233,198,018	(5.32)
Belanja Modal	676,867,950	4,404,945,315	(84.63)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>13,024,785,809</b>	<b>16,995,605,400</b>	<b>(23.36)</b>

*Belanja Pegawai*  
*Rp. 6,357,462,067*

### **B.2.1 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar pada 31 Desember 2014 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Umum Pegawai PNS; Tunjangan Fungsional Peneliti; Belanja Lembur; dan Uang makan PNS.

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 6,357,462,067. dan Rp 6,357,462,067.

Berdasarkan Tabel 9, realisasi belanja per 31 Desember 2014 mengalami kenaikan sebesar 1,57 persen dari realisasi belanja per 31 Desember 2013. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Bertambahnya pegawai (CPNS).

Tabel 9  
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2014 dan 2013

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA.2014	REALISASI TA.2013	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	4,028,148,540	3,725,114,300	8.13
Belanja Pembulatan Gaji PNS	67,802	85,401	(20.61)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	342,997,484	323,391,450	6.06
Belanja Tunj. Anak PNS	97,769,716	96,280,754	1.55
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000,835,000	1,127,270,000	(11.22)
Belanja Tunj. PPh PNS	153,576,793	160,607,321	(4.38)
Belanja Tunj. Beras PNS	254,038,800	254,761,140	(0.28)
Belanja Uang Makan PNS	435,464,000	515,257,600	(15.49)
Belanja Tunj. Umum PNS	100,425,000	100,926,101	(0.50)
Belanja Uang Lembur	51,528,000	51,608,000	(100.00)
Belanja Tunj. Transito	-	-	-
Belanja Tunj. Struktural	-	2,160,000	(100.00)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>6,464,851,135</b>	<b>6,377,097,484</b>	<b>1.38</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	18,477,170	19,635,417	(5.90)
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>6,446,373,965</b>	<b>6,357,462,067</b>	<b>1.40</b>

Belanja Barang  
Rp 5,901,543,894

### **B.2.2 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 5,901,543,894 dan Rp 6,233,198,018.

Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2014 mengalami penurunan 22,25 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2013. Hal ini disebabkan antara lain adanya penghematan anggaran.



Tabel 10  
Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2014 dan 2013

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2014	REALISASI TA. 2013	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1,031,547,005	1,006,597,339	2.48
Belanja Barang Non Operasional	2,097,532,097	2,498,854,821	(16.06)
Belanja Jasa	292,763,482	304,322,749	(3.80)
Belanja Pemeliharaan	1,447,346,920	1,145,923,764	26.30
Belanja Perjalanan Dinas	1,048,784,390	1,288,468,800	(18.60)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>5,917,973,894</b>	<b>6,262,302,890</b>	<b>(5.50)</b>
Pengembalian Belanja	16,430,000	(29,104,872)	-
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>5,901,543,894</b>	<b>6,233,198,018</b>	<b>(5.32)</b>

Belanja Modal  
Rp. 676,867,950

### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 676,867,950 dan Rp. 4,404,945,315.

Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2014 mengalami penurunan sebesar 84,63 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2013. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja modal yang di alokasikan hanya untuk pengadaan peralatan dan mesin untuk menunjang kegiatan balai dan kebun percobaan dan rehanilitasi mess mess;

Tabel 11  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2014 dan 2013

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2014	REALISASI TA. 2013	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	343,867,750	1,700,365,315	<b>(79.78)</b>
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	330,670,200	2,684,030,000	<b>(87.68)</b>
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	18,965,000	20,550,000	<b>(7.71)</b>
Belanja Modal Lainnya			
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>693,502,950</b>	<b>4,404,945,315</b>	<b>(84.26)</b>
Pengembalian Belanja Modal	16,635,000	-	0.00
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>676,867,950</b>	<b>4,404,945,315</b>	<b>(84.63)</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar  
Rp 9,452,520

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 9,452,520 dan Rp 11,497,820.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12  
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

No.	Aset Lancar	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp (22,980)	Rp (22,980)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp -	Rp -
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	Rp -	Rp -
4	Belanja Dibayar di Muka	Rp -	Rp -
5	Piutang Bukan Pajak	Rp -	Rp -
6	Bag Lancar Tagihan TP/TGR	Rp -	Rp -
7	Persediaan	Rp 9,475,500	Rp 11,520,800
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 9,452,520</b>	<b>Rp 11,497,820</b>

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp. (22.980)

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.(22.980). dan Rp.0. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang sudah dipertanggungjawabkan atau disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Namun pada Neraca saat ini saldo Kas di Bendaharaan Pengeluaran Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Rp. (22.980) dikarenakan kelebihan setor UP/TUP Tahun Anggaran 2013 sehingga bernilai minus dengan NTPN 1106091511080713 senilai Rp. 22.980, sehingga saldo dineraca bernilai minus. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13  
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	31 Desember 2013	31 Desember 2013
1	Bank BRI acc 0181.01.000208.30.9	-	-
2	Uang Tunai	-	-
3	Nilai di Neraca	(22,980)	(22,980)
	Jumlah	(22,980)	(22,980)

#### C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara  
Penerima Rp.0.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar masing-masing Rp.0. dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari PNBPN yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku penerima PNBPN yang sudah disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Nilai Kas di Bendahara Penerimaan pada Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar pada tanggal pelaporan adalah Rp.0

Kas Lainnya dan Setara  
Kas Rp.0.

#### C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan dalam Tabel 14.

Tabel 14  
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	31 Des 2014	31 Des 2013
Jasa Giro yang belum di setor ke kas negara	-	-
Pajak PPh yang Belum Disetor	-	-
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	-
Pengembalian Belanja belum disetor ke kas negara	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Belanja Dibayar di Muka  
Rp.0.

#### C.1.4. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Belanja

dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka disajikan dalam Tabel 15.

Tabel 15  
Rincian Belanja Dibayar di Muka

No	Jenis	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1	Pembayaran Internet	-	-
2	Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
3	Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

Piutang Bukan Pajak  
Rp.0.

#### C.1.5. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Tabel 16  
Rincian Piutang Bukan Pajak

No	Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

Mutasi piutang PNBPN pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	-
Mutasi tambah:	
-	
Mutasi kurang:	
-	
<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	-

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih – Piutang Bukan  
Pajak Rp.0.

### C.1.6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0.

Penyisihan piutang tak tertagih - piutang bukan pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing debitur. Rincian estimasi penyisihan sebagaimana tersaji pada Tabel 17.

Tabel 17  
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

No	Uraian	31 Des 2014
<b>NIHIL</b>		
Total		Rp -

Bag Lancar TGR  
Rp.0.

### C.1.7. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR tersaji dalam Tabel 18

Tabel 18  
Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Uraian	31 Des 2014
<b>NIHIL</b>		
Total		Rp -

Sedangkan mutasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Des 2014
<b>NIHIL</b>		
Total		Rp -

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih – Bag. Lancar  
TP/TGR Rp.0.

### C.1.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.0.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Rincian estimasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tersaji pada Tabel 19.

Tabel 19  
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Uraian	31 Des 2014
<b>NIHIL</b>		
<b>Total</b>		Rp -

Persediaan  
Rp 9,475,500

### C.1.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 9,475,500. dan Rp. 11,520,800.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 20.

Tabel 20  
Rincian Persediaan

No	Persediaan	T.A 2014	T.A 2013
1	Barang Konsumsi	-	250,800
2	Barang untuk Pemeliharaan	-	-
3	Suku Cadang	-	-
5	Tanaman Untuk dijual	9,475,500	11,270,000
<b>Jumlah</b>		<b>9,475,500</b>	<b>11,520,800</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp 76,681,808,623

## C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji sebesar Rp. 76,681,808,623 dan Rp. 77,768,204,654. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21

Rincian Aset Tetap

No	Jenis	31 Des 2014	31 Des 2013
1	Tanah	56,284,791,000	56,284,791,000
2	Peralatan dan Mesin	20,265,608,268	18,648,226,238
3	Gedung dan Bangunan	11,150,753,445	10,836,718,245
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,475,802,400	1,456,837,400
5	Aset Tetap Lainnya	39,919,000	39,919,000
<b>Jumlah</b>		<b>89,216,874,113</b>	<b>87,266,491,883</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(12,535,065,490)	(9,498,287,229)
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>		<b>76,681,808,623</b>	<b>77,768,204,654</b>

Tanah

Rp.56,284,791,000

### C.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 56,284,791,000. atau tidak ada penambahan atas pengadaan tanah maupun Rincian saldo tanah per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 22.

Tabel 22

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas	Nilai
1	00000001	258,265 m2	Rp 11,363,700,000
2	00000002	253,565 m2	Rp 11,156,900,000
3	00000003	150,220 m2	Rp 4,356,380,000
4	00000004	718,493 m2	Rp 20,836,217,000
5	00000005	216,000 m2	Rp 6,264,000,000
6	00000001	184 m2	Rp 15,939,000
7	00000001	67,425 m2	Rp 1,658,655,000
8	00000001	100 m2	Rp 216,000,000
9	00000001	100 m2	Rp 210,000,000
10	00000001	100 m2	Rp 207,000,000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 56,284,791,000</b>

Peralatan dan Mesin  
Rp 20,265,608,268

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp. 20,265,608,268 dan Rp. 18,648,226,238.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp 18,648,226,238</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp 343,867,750
Transfer Masuk	Rp 1,273,514,280
Mutasi kurang:	Rp -
Penghapusan	Rp -
<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>Rp 20,265,608,268</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	Rp (9,702,628,962)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2014</b>	<b>Rp 10,562,979,306</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

- a. Penambahan dari pembelian alat pengolah Data/Komputer berupa 2 unit printer senilai Rp. 7,500,000 , 1 unit laptop senilai Rp. 10,197,000, 1 unit scanner senilai Rp. 42,950,000;
- b. Penambahan dari pembelian 1 unit Kendaraan Roda 4 senilai Rp. 194,190,750;
- c. Penambahan dari pembelian 1 unit kendaraan roda 2 senilai Rp. 26.000.000;
- d. Penambahan dari pembelian Mebeulair 3 unit meja rapat senilai Rp. 20,997,500, 15 unit kasur spring bed senilai Rp. 44,895,000;
- e. Penambahan dari pembelian pengadaan sarana kebun percobaan berupa mesin pemotong rumput 5 unit senilai Rp. 12,462,500;
- f. Penambahan dari pembelian pengadaan peralatan pengairan berupa mesin pompa air Rp. 23,350,000;
- g. Penambahan dari transaksi transfer masuk dari BB-BIOGEN berupa peralat laboratorium dan pengolahan pertanian senilai Rp. 1,254.390,000;
- h. Penambahan dari transaksi transfer masuk dari PUSLITBANGBUN berupa 1 unit Notebook, 1 unit Kamera Digital, 1 set Peralatan Studio senilai Rp. 19,124,280

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.



Gedung dan Bangunan  
Rp. 11,150,753,445

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp.11,150,753,445 dan Rp. 10,836,718,245.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>10,836,718,245</b>
Mutasi tambah:	
Pembangunan Tempat Parkir	71,800,000
Pertambahan Nilai Gedung Ruang Kerja	61,743,200
Pertambahan Nilai Mess	180,492,000
Mutasi kurang:	
-	-
<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>11,150,753,445</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	(2,377,244,641)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2014</b>	<b>8,773,508,804</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penambahan nilai ruang kerja (Gordyn dan Tralis) Rp. 61,743,200 dan pembangunan tempat parkir senilai Rp. 71,800,000;
- Penambahan nilai mess KP.Cahaya Negeri Rp. 42,639,600 , Mess KP. Gunung Putri Rp. 47,784,000, Mess Balittri Rp. 95,068,400

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp. 1,475,802,400

### C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,475,802,400 dan Rp. 1,456,837,400.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>1,456,837,400</b>
Mutasi tambah:	
Pembuatan Jaringan Instalasi Air	18,965,000
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	-
<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>1,475,802,400</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2014	(455,191,887)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2014</b>	<b>1,020,610,513</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penambahan dari transaksi masuk instalasi jaringan air senilai Rp. 18.965.000.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya  
Rp 39.919.000

### C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp. 39.919.000. dan Rp. 39.919.000.

Saldo tersebut merupakan koleksi buku perpustakaan senilai Rp. 39.919.000.

<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>39,919,000</b>
Mutasi tambah:	
-	
Mutasi kurang:	
-	-
<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>39,919,000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2014	
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2014</b>	<b>39,919,000</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Konstruksi dalam  
Pengerjaan  
Rp .0

### C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan Perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp. (12,535,065,490)

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing Rp. (12,535,065,490) dan Rp. (9,498,287,229).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). .

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 23, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Tabel 23  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	Rp 56,284,791,000	Rp -	Rp 56,284,791,000
2	Peralatan dan Mesin	Rp 20,265,608,268	Rp (9,702,628,962)	Rp 10,562,979,306
3	Gedung dan Bangunan	Rp 11,150,753,445	Rp (2,377,244,641)	Rp 8,773,508,804
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 1,475,802,400	Rp (455,191,887)	Rp 1,020,610,513
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 39,919,000	Rp -	Rp 39,919,000
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Rp 89,176,955,113</b>	<b>Rp (12,535,065,490)</b>	<b>Rp 76,681,808,623</b>

### C.3 Piutang Jangka Panjang

Tuntutan

Perbendaharaan Rp. 0.

#### C.3.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24  
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Uraian	31 Des 2014
<b>NIHIL</b>		
<b>Total</b>		Rp -

Sedangkan mutasi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2013</b>	<b>Rp0.00</b>
Mutasi tambah:	
- TGR	Rp0.00
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi menjadi Bagian Lancar TP/TGR	Rp0.00
<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	<b>Rp0.00</b>

Penyisihan Piutang tak  
Tertagih - Tuntutan  
Perbendaharaan Rp. 0

### C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitor disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25  
Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Uraian	31 Des 2014
<b>NIHIL</b>		
<b>Total</b>		Rp -

Aset Lainnya  
Rp. 448,831,000.

### C.4 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp. 448,831,000 dan Rp. 448,831,000. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel 26.

Tabel 26  
Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	31 Des 2014
<b>NIHIL</b>		
Total		Rp 448,831,000

Aset Tak Berwujud  
Rp.0.

#### C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp.0. dan Rp.0..

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar berupa SK Pelepasan Varietas hasil penelitian tetapi tidak di masukan ke dalam nereca.

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Desember 2014 disajikan pada Tabel 27.

Tabel 27  
Rincian Aset tak Berwujud (Pelepasan Varietas)

No	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1	Pala Ternate 1	2009
2	Pala Tobelo 1	2009
3	Pala Tidero 1	2009
4	Cengkeh AFO	2010
5	Vanili Vania 1	2008
6	Vanili Vania 2	2008
7	Kemiri Alor	2010
8	Jambu Mete Galur B-02	2009
9	Jambu Mete Segayung Muktiharjo 1	2009
10	Jarak Pagar IP-3P	2009

Aset Lain-Lain  
Rp.448,831,000

#### C.4.2. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp. 448,831,000 dan Rp. 448,831,000.

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar serta dalam proses penghapusan

dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2013	Rp 448,831,000
Mutasi tambah:	
-	
Mutasi kurang:	
-	Rp -
Saldo per 31 Desember 2014	Rp 448,831,000
Akumulasi Penyusutan	Rp (320,256,000)
Nilai Buku per 31 Desember 2014	Rp 128,575,000

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Kewajiban Jangka

Kewajiban Jangka  
Pendek Rp (22,980)

## KEWAJIBAN

### C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji sebesar Rp. (22,980) dan Rp. 6,095,820.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 28.

Tabel 28  
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Des 2014
1	Uang muka dari KPPN	(22,980)
2	Utang Pihak Ke Tiga	-
Total		Rp (22,980)

Utang kepada Pihak  
Ketiga Rp.83,705,750

#### C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji sebesar Rp. 83,705,750. dan Rp. 6,118,800.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 29.

Tabel 29  
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Uang Makan Pegawai Bulan November dan Desember 2014	Rp 83,705,750	Uang Makan Pegawai Bulan November dan Desember 2014
<b>Total</b>		<b>Rp 83,705,750</b>	

Uang Muka dari KPPN  
Rp. (22.890)

### C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp (22.890) dan Rp. (22.890).

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Pendapatan Yang  
Ditangguhkan  
Rp 0

### C.5.3 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp 0. dan Rp 0.

Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, pengembalian belanja, serta pungutan/potong pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2014

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan pada Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 30.

Tabel 30.  
Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

No	Uraian	31 Des 2014
<b>NIHIL</b>		
<b>Total</b>		Rp -

Pendapatan Diterima  
Dimuka Rp.0.

#### C.5.4 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp 0. dan Rp 0.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan pada Tabel 31.

Tabel 31  
Rincian Pendapatan Diterima di Muka

No	Uraian	31 Des 2014
<b>NIHIL</b>		
<b>Total</b>		Rp -

### EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar  
Rp.9,475,500.

#### C.6 Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 30 Rincian Ekuitas Dana Lancar disajikan pada Tabel 32.

Tabel 32  
Rincian Ekuitas Dana Lancar

No	Uraian	Per 31 Des 2014
1	Cadangan Persediaan	9,475,500
<b>Total</b>		Rp 9,475,500

Cadangan Piutang  
Rp.0

#### C.6.1 Cadangan Piutang

Nilai Cadangan Piutang tersaji per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

Cadangan Piutang merupakan jumlah ekuitas dana lancar Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dalam bentuk piutang setelah dikurangi



dengan penyisihan piutang tak tertagih.

*Cadangan Persediaan  
Rp.9,475,500*

### **C.6.2. Cadangan Persediaan**

Nilai Cadangan Persediaan tersaji per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.9,475,500 dan Rp. 11,520,800.

Cadangan Persediaan merupakan jumlah ekuitas dana lancar Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dalam bentuk persediaan.

*Dana yang Harus  
Disediakan untuk  
Pembayaran Utang  
Jangka Pendek  
Rp. 83,705,750.-*

### **C.6.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek**

Nilai Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek disajikan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp. 83,705,750 dan Rp. 6,118,800.

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

*Ekuitas Dana Lancar  
Lainnya Rp.0.*

### **C.6.4 Ekuitas Dana Lancar Lainnya**

Nilai Dana Lancar Lainnya disajikan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

Ekuitas Dana Lancar Lainnya merupakan ekuitas dana lancar berupa kas lainnya dan setara kas.

*Belanja/Jasa yang Masih  
Harus Diterima  
Rp.0.*

### **C.6.5 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima**

Nilai Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain.

*Belanja/Jasa yang Masih  
Harus Diserahkan negatif  
Rp.0.*

### **C.6.6 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan**

Nilai Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp.0. dan Rp.0.

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Diinvestasikan dalam  
Aset Tetap  
Rp 76,681,808,623

## C.7 Ekuitas Dana Investasi

### C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap tersaji per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 76,681,808,623 dan Rp. 77,768,204,654.

Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan dalam  
Aset Lainnya  
Rp 128,575,000

### C.7.2 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya disajikan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 128,575,000 dan Rp. 137,536,560.

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya.

## D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Selama periode semester I tahun anggaran 2013 atau per 30 Juni 2013 DIPA pada Balai Penelitian Industri dan Penyegar mengalami 4 Kali Revisi tetapi tidak menyebabkan perubahan PAGU dengan nomor revisi sebagai berikut :

- a. DIPA-018.09.2.412022/2014 Revisi ke 01 tanggal 03 April 2014  
Pada revisi ke-2 menyebabkan perubahan PAGU anggaran dari Rp. 14,571,677,000 menjadi Rp. 13,477,951,000 dengan nomor revisi sebagai berikut :
    - a. DIPA-018.09.2.412022/2014 Revisi ke 02 tanggal 15 Juli 2014
    - b. DIPA-018.09.2.412022/2014 Revisi ke 03 Tanggal 10 September 2014
  - Pada revisi ke-4 menyebabkan perubahan PAGU anggaran dari Rp. 13,477,951,000 menjadi Rp. 13,517,951,000 dengan nomor revisi sebagai berikut :
    - a. DIPA-018.09.2.412022/2014 Revisi ke 04 Tanggal 16 Desember 2014
- Rincian perubahan atau revisi tersaji dalam lampiran tidak terpisahkan dalam laporan ini.

## **D.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Nomor: 43/Kpts/KP.340/I.4.4/03/2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Nomor: 08/Kpts/KU.010/I.4.4/01/2014 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar maka pada tanggal 15 Maret 2014 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Kuasa Pengguna Anggaran	: Prof.Dr.Ir.Risfaheri,M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	: Ir. Yullius Ferry
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Cecep Firman,SP
Bendahara	: Uun Kurniati, SP

**Lampiran A1**

**Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar  
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap  
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2014**

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
<b>A</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>20,265,608,268</b>	<b>9,702,628,962</b>	<b>10,562,979,306</b>
1	ALAT BESAR DARAT	10	258,921,000	234,021,000	24,900,000
2	ALAT BANTU	7	21,871,300	21,871,300	0
3	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	2,429,910,008	1,397,152,398	1,032,757,610
4	ALAT BENGKEL BERMESIN	7	37,500,000	5,625,000	31,875,000
5	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5	120,007,300	45,567,190	74,440,110
6	ALAT UKUR	5	346,570,800	212,751,840	133,818,960
7	ALAT PENGOLAHAN	4	1,080,577,000	525,934,125	554,642,875
8	ALAT KANTOR	5	312,065,600	228,680,260	83,385,340
9	ALAT RUMAH TANGGA	5	1,212,083,530	797,147,094	414,936,436
10	ALAT STUDIO	5	273,293,890	178,831,867	94,462,023
11	ALAT KOMUNIKASI	5	3,546,750	2,512,375	1,034,375
12	ALAT KEDOKTERAN	5	675,141,000	372,621,000	302,520,000
13	UNIT ALAT LABORATORIUM	8	11,690,783,200	4,783,517,956	6,907,265,244
14	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15	146,130,400	29,224,842	116,905,558
15	ALAT LABORATORIUM FISIKA	15	262,003,000	52,400,599	209,602,401
16	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7	658,773,000	282,331,285	376,441,715
17	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI	10	11,150,400	2,417,760	8,732,640
18	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4	85,849,000	51,736,750	34,112,250
19	KOMPUTER UNIT	4	513,504,590	383,437,748	130,066,842
20	PERALATAN KOMPUTER	4	71,624,300	58,104,800	13,519,500
21	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	4	12,411,200	5,093,460	7,317,740
22	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8	41,891,000	31,648,313	10,242,687
<b>B</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>11,150,753,445</b>	<b>2,377,244,641</b>	<b>8,773,508,804</b>
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50	8,202,975,545	1,299,060,333	6,903,915,212
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50	2,188,363,400	1,008,078,178	1,180,285,222
3	TUGU/TANDA BATAS	50	759,414,500	70,106,130	689,308,370
<b>C</b>	<b>Jaringan</b>		<b>618,572,975</b>	<b>145,162,878</b>	<b>473,410,097</b>
1	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30	225,276,600	55,330,121	169,946,479
2	INSTALASI GARDU LISTRIK	40	187,511,575	35,158,422	152,353,153
3	JARINGAN AIR MINUM	30	145,466,600	40,178,123	105,288,477
4	JARINGAN GAS	30	60,318,200	14,496,212	45,821,988
<b>D</b>	<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>		<b>329,429,550</b>	<b>182,881,713</b>	<b>146,547,837</b>
1	JALAN	10	329,429,550	182,881,713	146,547,837
<b>E</b>	<b>IRIGASI</b>		<b>527,799,875</b>	<b>127,147,296</b>	<b>400,652,579</b>
1	BANGUNAN AIR IRIGASI	50	35,000,000	4,900,000	30,100,000
2	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30	314,982,400	86,392,801	228,589,599

Laporan Keuangan Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar  
Tahun Anggaran 2014

---

3	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40	177,817,475	35,854,495	141,962,980
<b>D</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>		39,919,000	0	39,919,000
1	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	39,919,000	0	39,919,000
<b>E</b>	<b>Aset Tetap yang Tidak Digunakan</b>		<b>448,831,000</b>	<b>320,256,000</b>	<b>128,575,000</b>
1	ALAT PENGOLAHAN	4	753,000	753,000	0
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50	440,873,000	314,315,400	126,557,600
3	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50	7,205,000	5,187,600	2,017,400
<b>Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya</b>			<b>89,665,705,113</b>	<b>11,404,650,834</b>	<b>78,261,054,279</b>

**Lampiran A2**

**BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR  
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014**

BA /UAPA : (1) 018 (KEMEBTERIAN PERTANIAN)  
Eselon 1/UAPPA-E1 : (2) 09 (BADAN LITBANG PERTANIAN)  
UAPPA-W : (3) 0200 (JAWA BARAT)  
Satuan Kerja/UAKPA : (4) 412022 (BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR)

No.	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)	Penyesuaian Akrual (Rp)		Realisasi Menurut Basis Akrual (Rp)	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1.	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	511129	Uang Makan Pegawai	431,792,800	83,705,750		515,498,550	SPM

**Catatan : Bukti Tagihan Terlampir**

**Tata Cara Pengisian Format Laporan**

- (1) Kode BA diisi kode/uraian Bagian Anggaran di mana Satuan Kerja bersangkutan berada.
- (2) Kode Eselon I/UAPPA-E1 diisi kode/uraian Eselon 1 bersangkutan.
- (3) Kode UAPPA-W diisi kode/uraian UAPPA-W bersangkutan.
- (4) Kode Satker diisi kode/uraian Satuan Kerja/UAKPA bersangkutan.
- (5) Kode Akun diisi kode 6 digit akun Pendapatan/Belanja sesuai Bagan Akun Standar.
- (6) Uraian Kode Akun diisi uraian akun 6 digit Pendapatan/Belanja sesuai Bagan Akun Standar.
- (7) Realisasi Menurut Basis Kas diisi berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran yang dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi.
- (8) Penyesuaian Akrual diisi penambahan jumlah pendapatan/belanja karena penyesuaian atas masing-masing akun yang diakrualkan berdasarkan dokumen sumber yang ada.
- (9) Penyesuaian Akrual diisi pengurang jumlah pendapatan/belanja karena penyesuaian atas masing-masing akun yang diakrualkan berdasarkan dokumen sumber yang ada.
- (10) Realisasi Menurut Basis Akrual diisi dengan menjumlahkan/mengurangkan realisasi menurut basis kas dengan penyesuaian akrual.
- (11) Dokumen Sumber diisi dengan nama dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat penyesuaian akrual.

---

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI  
DAN PENYEGAR,

Prof Dr. Ir. RISFAHERI, M.Si  
NIP. 19640117 198903 1 002